

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN PUSAT

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1990 tentang Peningkatan Mutu Posyandu.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/536/SJ tahun 1999 tentang Revitalisasi Posyandu. Tanggal 3 Maret 1999;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otda nomor 411.3/1116/SJ tentang Revitalisasi Posyandu tanggal 13 Juni 2001;
Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu);
Peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
Pedoman Umum Posyandu



KEBIJAKAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT;

- Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pembentukan Pokjanal Posyandu Provinsi Jawa Barat;
- PEMDA PROVINSI :
- BOP Posyandu Tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000/per posyandu;
- Stimulan untuk Juara Lomba Posyandu dan Kader Posyandu;
- Bantuan gedung posyandu



KEBIJAKAN TINGKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT;

VISI "BANDUNG BARAT CERMAT"

Bersama membangun masyarakat yang cerdas, rasional, maju, agamis, dan sehat. Berbasis pada pengembangan kawasan agroindustri dan wisata ramah lingkungan. Mengandung pengertian seluruh komponen sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat baik sumber daya aparatur maupun masyarakat harus berpendidikan, berakhlak mulia dan memiliki integritas dan berdayasaing.

MISI :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik;
2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas sehat dan berdayasaing;**
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agrobisnis dan agro wisata dalam upaya pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan;
6. Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

KEBIJAKAN DASAR HUKUM :

- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan;
- Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Pokjanal Posyandu Kabupaten

KEBIJAKAN PENGANGGARAN :

- Bantuan Keuangan untuk Operasional Posyandu di Kabupaten Bandung Barat;
- Fasilitasi Kebijakan pembentukan Kelembagaan Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu.
- Dukungan anggaran untuk Pokjana I Posyandu;
- Dukungan anggaran untuk Posyandu melalui SKPD terkait, ADD dan PKK;
- Stimulan untuk Juara Lomba Posyandu dan Kader Posyandu ;
- Pembinaan yang dilakukan oleh Pokjanal Posyandu.

KEBIJAKAN PROGRAM :

- Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu Kabupaten, Pokjanal Posyandu Kecamatan, Pokja Posyandu Desa dan Posyandu;